**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Masalah**

Kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama memiliki dampak yang sangat merugikan pihak Jerman itu sendiri. Hal ini terbukti dengan diadakannya perjanjian Versailles*,* pada tahun 1918 untuk mendiskusikan apa saja yang harus ditanggung Jerman, sebagai sebuah konsekuensi perang. Jerman mengalami kerugian besar dalam Perjanjian Versailles dengan sanksi berupa pemberian sebagian wilayah kepada negara lain, reduksi angkatan bersenjata, penutupan industri bersenjata serta pembayaran denda atas kerugian perang.[[1]](#footnote-2) Perang Dunia Pertama juga membawa perubahan politik dan ekonomi masyarakat Eropa. Selain itu, Perjanjian Versailles secara tidak langsung telah mengubah pola pemikiran politik masyarakat dan memicu revolusi industri.[[2]](#footnote-3) Perjanjian Versailles juga menjadi awal tercetusnya *Fourteen Points* oleh Woodrow Wilson mengenai cara mencapai perdamaian serta awal penggunaan diplomasi modern sehingga Woodrow Wilson disebut sebagai bapak diplomasi modern. Terdapat tiga gagasan utama Fourteen Points, yakni larangan perjanjian rahasia, negosiasi harus dilakukan secara terbuka, dan larangan untuk usaha dibalik layar dalam mengubah ketetapan secara rahasia.[[3]](#footnote-4)

Namun, dalam perjalanannya LBB mengalami kegagalan yang berujung pada terjadinya Perang Dunia Kedua. Amerika Serikat, sebagai negara penggagas, enggan berpartisipasi untuk tergabung ke dalam LBB melahirkan suatu indikasi kegagalan organisasi tersebut. LBB tidak memiliki angkatan bersenjata dan bergantung pada kekuatan internasional, sehingga aturan nya memiliki kecendrungan untuk tidak ketat dan tidak mengikat. Selain itu, negara-negara yang berpartisipasi tidak memberikan perhatian secara penuh sehingga lebih mementingkan kepentingan negara yang saat itu terfokus pada perlombaan kekuatan.[[4]](#footnote-5) Hal ini menimbulkan praktik diplomasi rahasia yang masih terjadi oleh beberapa negara anggota, meskipun LBB telah didirikan sebagai sebuah sarana diplomasi terbuka.

Terjadinya The Great Depression merupakan peristiwa besar pasca Perang Dunia Pertama yang membawa banyak kerugian negara-negara di dunia. The Great Depression adalah krisis ekonomi yang berawal dari peristiwa *The Wall Street Crash* pada tahun 1929, yaitu jatuhnya bursa saham di Amerika Serikat yang menimbulkan kemerosostan ekonomi. Krisis ini kemudian menyebar ke kawasan Eropa dan berbagai kawasan negara industri, menimbulkan krisis terbesar sepanjang masa.[[5]](#footnote-6) Jerman, sebagai negara yang semakin terpuruk setelah terkena dampak dari Perjanjian Versailles dan The Great Depression berusaha mencari jalan keluar dari keterpurukan pada saat itu serta membangun kembali kekuatan Jerman di masa depan. Pada tahun 1933, muncul sosok Adolf Hitler sebagai kanselir pertama Jerman. Kepemimpinan Hitler yang diktator membuahkan kebijakan-kebijakan intervensionis melalui politik Lebensraum. Hitler mulai mencoba untuk menaklukan kembali pecahan-pecahan Jerman melalui slogannya, *Deutchland Ubber Alles*.[[6]](#footnote-7)

Jerman yang terpuruk karena Perjanjian Versailles dan The Great Depression merancang penaklukan-penaklukan yang berujung pada meletusnya Perang Dunia Kedua. Pada bulan Mei tahun 1938, Hitler memerintahkan para Jendralnya untuk merancanakan perang melawan Cekoslovakia dengan dalih membebaskan masyarakat berbahasa Jerman di Sudetenland dari dominasi Ceko.[[7]](#footnote-8) Negara-negara besar seperti Inggris dan Perancis kemudian turun tangan untuk terlibat langsung. Jerman yang bergantung dengan ekspor minyak Inggris membatalkan operasi militer untuk menghindari kerugian. Kemudian, Perdana Menteri Inggris, Neville Chamberlain datang ke Jerman untuk melakukan negosiasi atas rencana invasi Hitler terhadap Cekoslovakia. Negosiasi ini dihadiri oleh Adolf Hitler, Neville Chamberlain, Edouard Daladier dan Benito Mussolini yang melahirkan Perjanjian Munich pada 1938 dengan memberikan Sudetenland kepada Jerman.[[8]](#footnote-9) Namun, usaha Chamberlein untuk menghindari perpecahan Perang Dunia tidak melahirkan hasil yang diharapkan. Hitler terus melanjutkaan ekspansi dan intervensionisnya. Hitler semakin memperkuat keinginannya dalam menyebarkan paham Nazi diseluruh dunia sehingga mendorong pecahnya Perang Dunia Kedua.

Perang Dunia Kedua kemudian ditandai dengan penyerangan Jerman ke Polandia pada tanggal 1 September 1939. Disusul serangan yang dilakukan oleh Jepang ke pangkalan laut Amerika Serikat, Pearl Harbor pada tanggal 7 Desember 1941, sekaligus menjadi puncak kegagalan LBB. Hal tersebut, pada tahun 1941, memaksa F.D. Roosevelt sebagai Presiden Amerika Serikat untuk mengumumkan keikutsertaannya dalam Perang Dunia Kedua, yang sebelumnya telah menerapkan kebijakan Netral setelah 76% warga negara Amerika Serikat menolak untuk terlibat dalam perang di Eropa.[[9]](#footnote-10) Uni Soviet pada akhirnya juga terlibat setelah mendapat serangan Jerman melalui Operasi Barbarossa pada tanggal 22 Juni 1941, sehingga Joseph Stallin sebagai pemimpin Uni Soviet menyatakan perang melawan Jerman[[10]](#footnote-11). Selain itu, Jepang sebagai satu-satunya negara Asia yang tergabung ke dalam poros Axis, menyebarkan pengaruhnya melalui imperealisasi. Selain penyerangan ke Pearl Harbor, Jepang juga melakukan invasi besar-besaran terhadap China serta mengambil alih daerah koloni Belanda, Inggris dan Prancis melalui invasi di kawasan Asia Tenggara. Italia juga muncul sebagai kekuatan baru dengan paham fasisme, dibawah pimpinan Benito Mussolini. Fasisme di Italia muncul akibat perekonomian yang memburuk pasca meletusnya Perang Dunia Pertama. Mussolini kemudian membentuk kelompok radikal yang melibatkan kekerasan fisik untuk menolak sistem parlemen dengan gerakan anarki. Serangan ke Ethiopia merupakan gerakan pertama yang dilanjutkan dengan penyerangan lain.[[11]](#footnote-12) Sebagai tanggapan dibentuknya poros Axis, yang beranggotakan Jerman, Italia dan Jepang, AS, Inggris, Prancis dan Uni Soviet kemudian membentuk aliansi The United Nations.[[12]](#footnote-13)

Diplomasi Amerika Serikat dan Inggris memberikan pengaruh yang besar selama terjadinya Perang Dunia Kedua. F. D. Roosevelt, sebelum terlibatnya Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia Kedua, memberikan bantuan secara berkelanjutan kepada militer Inggris dan Prancis. Selain itu, Roosevelt mampu memulihkan kondisi AS ketika masa The Great Depression dengan program-program lapangan kerja, jaminan sosial dan sebagainya melalui kebijakan “New Deal”. Sedangkan Inggris dibawah pimpinan Perdana Menteri, Winston Churchill yang pada awalnya cenderung defensive, berubah menjadi ofensif. Churchil dapat menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk memperkuat militer Inggris. Churchil juga menjadi salah satu tokoh utama serta turut berdiplomasi dengan baik dalam Konferensi Casablanca, Pertemuan Teheran, Konferensi Yalta, hingga Konferensi Potsdam. Usaha melalui Atlantic Charter oleh Churchill dan Roosevelt mengenai kebijakan-kebijakan perang untuk mencapai *self-determination* dari suatu negara menjadi cikal bakal berdirinya PBB.[[13]](#footnote-14)

Diplomasi sebagai salah satu soft power yang dimiliki suatu negara guna mempengaruhi negara lain dalam memenuhi kepentingan nasionalnya terdiri dari beberapa pola antara lain diplomasi bilateral, diplomasi multilateral, diplomasi asosiasi, diplomasi konferensi, diplomasi personal, dan *summit diplomacy*.

Alasan peneliti memilih judul tersebut karena masih belum adanya penjelasan serta kajian yang lebih mendalam mengenai diplomasi, pada masa Perang Dunia Kedua sebagai suatu solusi yang tidak melibatkan kekuatan militer secara langsung. Selain itu, peneliti juga berusaha untuk menjelaskan sejauh mana upaya diplomatik yang dijalankan oleh pemimpin dari negara-negara Sekutu yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Judul penelitian ini juga diharapkan dapat mengkaji lebih dalam terkait bentuk diplomasi serta negosiasi apa yang terjalin antara negara-negara yang terlibat.

Dengan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan mengenai: **“DIPLOMASI PIHAK SEKUTU SEBAGAI SUATU UPAYA DIPLOMATIK DALAM PROSES PENYELESAIAN KONFLIK PERANG DUNIA KEDUA”**

* 1. **Identifikasi Masalah**

Dalam penelitian ini adapun beberapa masalah yang akan penulis bahas, yaitu:

1. Apa saja bentuk diplomasi dan negosiasi yang terjalin diantara negara-negara Sekutu yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua?
2. Sejauh mana upaya diplomatik pihak Sekutu yang terjadi pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sebuah solusi penyelesaian konflik?

**1.2.1 Pembatasan Masalah**

Dikarenakan luasnya permasalahan yang dikemukakan dan terbatasnya waktu penelitian, penulis merasa perlunya suatu pembatasan masalah. Pembatasan masalah diperlukan untuk memfokuskan serta menegaskan materi agar tidak menyimpang dari topik yang penulis ambil. Penjelasan jelas oleh para sejarawan terkait dimulainya Perang Dunia Kedua masih banyak diperdebatkan. Awal terjadinya perang umumnya disetujui pada tanggal 1 September 1939, yang dimulai dengan invasi Jerman ke Polandia.

Sementara sejarawan Britania Raya A. J. P. Taylor menjelaskan bahwa Perang Tiongkok-Jepang dan perang di Eropa beserta koloninya terjadi bersamaan dan dua perang ini bergabung pada tahun 1941. Artikel ini memakai penanggalan konvesional. Tanggal-tanggal awal lainnya yang sering dipakai untuk Perang Dunia II juga meliputi invasi Italia ke Abisinia pada tanggal 3 Oktober 1935.[[14]](#footnote-15) Tanggal lain mengenai awal perang ini adalah dimulainya Perang Tiongkok-Jepang Kedua pada 7 Juli 1937. Sejarawan Britania raya lainnya, Antony Beevor memandang awal Perang Dunia Kedua terjadi saat Jepang menyerbu Manchuria bulan Agustus 1939.[[15]](#footnote-16)

Namun, dalam skripsi ini, penulis hanya melingkari permasalahan upaya diplomatik dalam Perang Dunia Kedua selama kurun waktu 1939 hingga berakhirnya perang dunia kedua, yaitu pada tahun 1945. Selain itu, mengingat bahwa invasi Jerman ke Polandia pada tahun 1939 mengindikasikan kegagalan LBB dalam mencegah terjadinya konflik perang, pada penelitian ini penulis akan memusatkan upaya diplomatis yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin dari negara-negara yang terlibat di Perang Dunia Kedua.

* + 1. **Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian beberapa masalah pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut: **“Apakah diplomasi pihak Sekutu merupakan suatu upaya yang efektif dalam proses penyelesaian konflik pada masa Perang Dunia Kedua?”**

* 1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

**1.3.1 Tujuan Penelitian:**

Adapun tujuan dibuatnya penelitian ini, sebagai berikut:

* Untuk dapat mengetahui permasalahan diplomatik yang terjadi pada masa Perang Dunia Kedua
* Untuk dapat memahami berbagai konflik yang terjadi pada masa Perang Dunia Kedua
* Untuk dapat menjelaskan sejauh mana upaya diplomasi, sebagai suatau langkah yang efektif, dalam penyelesaian konflik Perang Dunia Kedua.
  + 1. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai:

* Sebuah rujukan tentang diplomasi melalui penjelasan yang lebih mendalam terkait alasan-alasan yang mendasari terjadinya upaya diplomatik oleh pemimpin dari negara-negara yang terlibat.
* Sebuah pembelajaran tentang langkah-langkah yang diterapkan pemerintah-pemerintah Sekutu yang terlibat dalam mengupayakan diplomasi sebagai suatu solusi dalam penyelesaian konflik di masa Perang Dunia Kedua.
* Memperkaya penulisan diplomasi pada umumnya dan khususnya penulisan tentang upaya-upaya diplomatik pihak Sekutu pada masa Perang Dunia Kedua.
  1. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
     1. **Kerangka Teoritis**

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Menurut Kerlinger, teori adalah himpunan konstruk (konsep), defenisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.[[16]](#footnote-17) Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis.[[17]](#footnote-18) Sementara itu yang dimaksud dengan krangka teoritis adalah suatu kumpulan teori dan model dari literatur yang menjelaskan hubungan dalam masalah tertentu.[[18]](#footnote-19)

Hubungan Internasional adalah suatu bentuk hubungan antarnegara yang merdeka dan berdaulat oleh dua negara atau lebih yang mencakup berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Hal tersebut juga menyangkut pembahasan bahwa negara-negara di dunia menjalin hubungan secara internasional. Suatu negara tidak dapat hidup sendiri, melainkan berbatasan dengan negara-negara lain. Kenyataan ini semakin memperkuat pentingnya hubungan internasional yang melibatkan banyak negara. Selain itu, suatu negara mungkin berkepentingan untuk menjalin hubungan dengan negara lain demi memajukan kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, budaya dan sebagainya.

Untuk memberi kejelasan pada penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian, yang juga diharapkan dapat membantu dalam memberikan kejelasan pada penelitian ini. Untuk memahami pengertian hubungan Internasional, penulis memakai pengertian yang berasal dari **Theodore A. Couloumbis** dan **James H. Wolfe** dalam bukunya Pengantar Hubungan Internasional sebagai berikut:

**“International relations is a systematic study of observable phenomena which tries to derive the basic variables in order to explain behavior and to reveal characteristics or types of relationships between social units.”** [[19]](#footnote-20)

Dalam kehidupannya manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Dalam kajian sosiologis, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain disebut dengan gregariousness. Lebih lanjut, interaksi sosial sendiri merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang-perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang-perorangan dengan kelompok manusia.[[20]](#footnote-21)

Interaksi sosial sendiri dimulai ketika dua orang bertemu (tatap muka), saling menegur (kontak suara), dan berjabat tangan (kontak fisik). Lebih lanjut, interasi sosial menurut Karp dan Yoels ditentukan oleh ciri-ciri fisik dan penampilan. Ciri-ciri fisik meliputi jenis kelamin, usia, ras, sedangkan penampilan meliputi daya tarik, bentuk tubuh, busana, dan wacana percakapan.[[21]](#footnote-22) Lebih lanjut, bentuk-bentuk interaksi sosial yang sering dijumpai dalam masyarakat, antara lain; kerjasama, persaingan, dan pertentangan (konflik).

Konflik adalah suatu masalah sosial yang timbul karena adanya perbedaan pandangan yang terjadi di dalam masyarakat maupun negara. Pengertian Konflik menurut Robbin adalah suatu proses yang dimulai bila satu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera memengaruhi secara negatif pihak lain.[[22]](#footnote-23) Menurut Leopod Von Wiese, pengertian Konflik adalah suatu proses sosial dimana kelompok manusia atau orang perorang yang berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi tujuannya tersebut dengan jalan menentang pihak lain disertai dengan kekerasan dan ancaman.[[23]](#footnote-24)

Konflik pada hakikatnya terbagi atas dua jenis, yakni konflik vertikal atau konflik antara kelas atas (penguasa) dan kelas bawah (yang dikuasai), serta konflik horizontal atau konflik yang terjadi di antara kelas yang sama. Untuk membahas setiap situasi konflik, Lewis Coser membedakan konflik menjadi dua tipologi, yakni konflik realistis dan konflik non-realistis. Konflik realistis adalah konflik yang berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan, dan yang ditujukan pada objek yang dianggap mengecewakan. Sementara, konflik non-realistis diartikan oleh Coser sebagai konflik yang bukan berasal dari tujuan-tujuan saingan yang antagonistik, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari satu pihak.[[24]](#footnote-25)

Dari beberapa pengertian konflik yang disampaikan pakar di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Konflik adalah suatu keadaan dimana adanya kesenjangan yang dirasakan oleh satu dan dua pihak atau lebih - yang dalam prosesnya bersifat dinamis dan keberadaannya lebih banyak menyangkut persepsi dari orang atau pihak yang mengalami dan merasakannya - yang melibatkan kekerasan dan ancaman guna tercapainya apa yang telah menjadi tujuannya.

Perang adalah sebuah aksi fisik dan non fisik (dalam arti sempit, adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan) antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan.[[25]](#footnote-26) Perang secara purba di maknai sebagai pertikaian bersenjata. Menurut Clausewitz, perang merupakan tindakan yang ditujukan untuk memaksa atau mendorong pihak lawan untuk memenuhi keinginan pihak yang melakukan perang.

**“War is an act intended to compel our opponent to fulfil our will.”**[[26]](#footnote-27)

Pernyataan Clausewitz mengenai konsepsi perang tersebut muncul dari fenomena perang yang pada waktu itu berlangsung secara dominan di Eropa. Kemudian timbul pertanyaan, apakah perang merupakan tindakan yang rasional, intelijen, ataupun purposif.

Sedangkan Hans Morgentahu dari perspektif realis menilai perang sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional (*national interest*).[[27]](#footnote-28) Instrumen militer seringkali digunakan sebagai media perang yang efektif. Seperti yang diungkapkan oleh Hans Morgenthau mengenai upaya Napoleon Bonaparte yang lebih menggunakan instrumen kultur untuk menaklukkan suatu wilayah:

**“If he could make and hold military conquest, he would reach his imperialistic goal more quickly…”**

Perang juga merupakan fenomena politik internasional dalam konstelasi Hubungan Internasional bangsa-bangsa di dunia dalam sistem politik global. Keberadaan perang sendiri sampai sekarang masih selalu ada terkait dengan sifat dasar manusia yang berupa agressor. Sifat ini direpresentasikan oleh negara (*state*) sebagai perwujudan aktor dalam tata politik internasional. Hal inilah yang membuat perang selalu menarik untuk dibahas dan didiskusikan.

Sebab-sebab sebuah negara melakukan perang, atau faktor-faktor penyebab perang secara umum, terbagi menjadi tiga:

* **Pertama**, penyebab perang disebabkan oleh alasan perolehan ekonomi, diukur dalam hal perolehan sumber daya alam seperti emas, perak, minyak, atau monopoli perdagangan atau akses pasar, bahan mentah (*raw materials*) dan investasi. Alasan atau faktor penyebab perang ini dapat dikatakan sejalan dengan perspektif merkantilis yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eopa pada zaman dahulu berupa perdagangan dan penjajahan yang dilakukan pada era merkantilisme mulai sekitar abad ke-16.[[28]](#footnote-29)
* **Kedua,** perang dilangsungkan untuk alasan keamanan, untuk menentang atau melawan ancaman yang datang dari luar terhadap integritas bangsa ataupun kemerdekaan. Perang dilakukan sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan atau yang mengancam stabilitas negara.
* **Ketiga,** permasalahan Perang dilancarkan untuk mendukung tujuan ideologi, *political faith*, atau menyebarluaskan nilai-nilai kepercayaan yang tengah dianut. Perang Ideologi merupakan pertentangan antara dua sistem nilai yang saling berlawanan. Perang Ideologi tidak semata-mata menggunakan instrumen militer, namun lebih banyak memanfaatkan jalur-jalur propaganda, seperti pengaruh, infiltrasi, dan lain sebagainya. Perang mengenai permasalahan ideologi dapat bertransformasi bentuknya menjadi perang yang berbasis pada faktor identitas.

Pada awal abad ke-19, perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Hal ini tercermin dari doktrin angkatan perangnya seperti "Barang siapa menguasai ketinggian maka menguasai dunia". Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan atas ketinggian harus dicapai oleh teknologi. Namun kata perang tidak lagi berperan sebagai kata kerja, namun sudah bergeser pada kata sifat.

Harold Nicholson, yang merupakan seorang pengkaji dan praktisi dalam bidang diplomasi pada abad ke dua puluh menegaskan bahwa dalam bahasa yang lebih mutakhir kata diplomasi digunakan untuk menegaskan paling tidak 5 hal yang berbeda. Dari kelima hal tersebut empat hal yang paling penting adalah politik luar negeri, negosiasi, mekanisme pelaksanaan negosiasi dan suatu cabang dinas luar negri. Harold Nicholson pun menyatakan bahwa interpretasi yang kelima adalah suatu kualitas abstrak yang dalam arti baik merupakan keahlian dalam pelaksanaan negosiasi internasional.[[29]](#footnote-30)

Sementara K.M Panikar menyatakan bahwa Diplomasi, dalam hubungannya dengan politik internasional, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain.[[30]](#footnote-31) Svarlien juga menyatakan bahwa diplomasi adalah seni dan ilmu perwakilan Negara dan perundingan. Kata yang sama juga telah dipakai untuk menyatakan secara umum keseluruhan kompleks hubungan luar negri suatu Negara, yaitu departemen luar negeri termasuk perwakilan luar negerinya.[[31]](#footnote-32)

Lebih lanjut lagi, Harold Nicolson menjelaskan diplomasi ke dalam beberapa hal, diantaranya:

1. *The management of internal relation by means negotiation*;
2. *Skill or address in the conduct of international intercourse and negotiations*;
3. *The method by which these relations are adjusted and managed by ambassadors and envoys*; dan
4. *The bussines of art of the diplomatic.*

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa diplomasi, yang cenderung sangat erat dihubungkan dengan hubungan antar Negara, adalah seni mengedepankan kepentingan suatu Negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan Negara lain.

Dalam diplomasi ini terdapat dua teori yang dikembangkan oleh Nicholson yaitu Teori Warrior dan Teori Shopkeeper (*merchantile*). Teori Warrior menggambarkan politik kekuatan, sangat memperhatikan prestise nasional dan status negara itu sendiri untuk mencapai kemenangan. Sedangkan Teori Shopkeeper (*merchantile*) lebih mengedepankan negosiasi yang bersifat menguntungkan secara politis dan bersifat memuaskan dengan cara konsiliasi dan kompromi yang terjalin di antara dua negara atau lebih. Teori ini menganggap diplomasi sebagai usaha untuk menciptakan hubungan atau kontak langsung secara bersahabat yang saling pengertian melalui konsensi dari nilai timbal balik.

Ada beberapa bentuk diplomasi, empat diantaranya adalah Diplomasi Pribadi (*personal diplomacy by foreign secretary*), Diplomasi Tingkat Tinggi (*summit diplomacy*), Diplomasi Konferensi (*conference diplomacy*), dan Diplomasi Parlementer (*parliamentary diplomacy*).

* + 1. **Asumsi Dasar**

Dengan penelitian ini, penulis akan mencoba untuk menilik seberapa jauh upaya diplomatik, sebagai salah satu langkah yang efektif, dalam penyelesaian konflik pada masa Perang Dunia Kedua. Penelitian ini menganalisa serta mengkaji apa saja peran serta bentuk diplomasi, yang meliputi konferensi, negosiasi, serta konvensi yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul sebagai bagian sejarah dari Perang Dunia Kedua.

Dilihat dari kerangka teoritis yang telah dijabarkan diatas yang terkait upaya diplomatis pihak Sekutu sebagai salah satu solusi dalam penyelesaian konflik ataupun perang – dalam hal ini Perang Dunia Kedua - penulis memiliki beberapa asumsi dasar terkait permasalahan tersebut, diantaranya:

* Selain perlawanan senjata, diplomasi merupakan sebuah solusi penyelesaian konflik dalam perang.
* Dengan terlpeliharanya hubungan diplomatis yang terjalin diantara negara-negara, kemungkinan untuk meletusnya konflik berkelanjutan akan sangat kecil.
* Banyak negara yang secara tidak langsung tidak terlibat dalam konflik, ikut terlibat dalam penyelesaian konflik pada masa Perang Dunia Kedua melalui sebuah forum diplomatik yang diupayakan oleh negara-negara yang terlibat langsung ke dalam perang.
  + 1. **Hipotesis**

Berdasarkan penjabaran tentang latar belakang, perumusan masalah, kerangka teoritis, dan asumsi-asumsi yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat menarik sebuah hipotesis, yang merupakan bentuk kesimpulan yang bersifat sementara dan masih perlu diuji dan dikaji lebih mendalam kebenarannya, sebagai berikut:

**“Diplomasi merupakan sebuah langkah yang memiliki kecenderungan bersifat efisien dan efektif dalam penyelesaian suatu konflik pada masa Perang Dunia Kedua, sebab langkah penyelesaian dalam diplomasi tidak melibatkan angkatan bersenjata secara langsung, namun memiliki kapabilitas untuk mensiasati penyusunan strategi perang sebagai suatu penyelesaian konflik.”**

* + 1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

Tabel. 1.1

Tabel Operasional Variabel

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis** | **Indikator (Empirik)** | **Veifikasi (Analisis)** |
| **Variabel Bebas:** | 1. Adanya bantuan materil serta dukungan moril terhadap negara-negara yang terlibat langsung dalam Perang Dunia Kedua. | 1. Data (Fakta) salah satunya, kebijakan luar negeri AS untuk memberikan bantuan materi serta logistik sebesar $50 Miliar (1941-1945) terhadap negara-negara yang terlibat langsung, seperti Inggris dan Russia. |
| Pemimpin-pemimpin negara Sekutu yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua, dapat mengoptimalkan upaya diplomatik sebagai suatu alat resolusi konflik |
|  | 2. Diadakannya konferensi-konferensi tingkat tinggi antara negara-negara utama yang terlibat dalam perang. | 2. Data (Fakta) salah satunya, Konferensi Moskow pada tahun 1943 yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Russia, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, dan Menteri Luar Negeri Inggris. Konferensi itu membahas tentang rencana pembentukan organisasi internasional yang menjamin perdamaian. |
|  | 3. Diluncurkannya invasi sebagai bentuk perlawanan dan sebagai hasil atas perundingan-perundingan diplomatis. | 3. Data (Fakta) disepakatinya serbuan front baru di pantai utara Prancis oleh pasukan sekutu pada tahun 1944 sebagai hasil dari konferensi Tehran. |
| **Variabel Terikat:** | Dengan memaksimalisasikan dan mengimplementasikan program serta kebijakan yang merupakan sebuah hasil atas perundingan diplomatik. | Data (Fakta) dibentuknya PBB beserta pasukan keamanan PBB pasca perang untuk menjamin keamanan negara-negara berdaulat dari ancaman agresi, invasi dan aneksasi. |
| Konflik yang melibatkan beberapa negara dapat diselesaikan melalui upaya serta langkah-langkah diplomatik. |

* + 1. **Skema Kerangka Teoritis**

Gambar. 1.1

Skema Kerangka Teoritis

Konflik

Perang

Diplomasi

Upaya diplomatik dalam penyelesaian konflik

Upaya pengangkatan senajata dalam penyelesaian konflik

Penyelesaian konflik yang efektif

* 1. **Metode dan Teknik Pengumpulan Data**
     1. **Tingkat Analisis**

Dilihat dari judul yang diangkat, penulis mengambil tingkat analisa Induksionis, yang berarti unit analisanya pada tingkatan yang lebih tinggi. Alasan mengapa penulis mengambil tingkatan tersebut karena, dilihat dari luasnya tingkatan permasalahan tersebut sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu kajian, tentang upaya serta praktik diplomasi yang tepat dalam penyelesaian konflik.

* + 1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian ex post facto, yaitu penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. Penelitian ex post facto bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas secara keseluruhan sudah terjadi.. Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelaahan studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku dan sumber artikel.

* + 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yakni melalui studi pustaka terhadap sejumlah buku dan artikel yang menjelaskan tentang Perang Dunia Kedua serta perkembangan sejarah diplomasi. Sumber utama yang digunakan ialah buku yang ditulis oleh John L. Snell, yang berjudul Illusion and Necessity: The Diplomacy of Global War, 1939-1945, serta film dokumenter yang berhubungan dengan Perang Dunia Kedua.

* 1. **Lokasi dan Lamanya Penelitian**
     1. **Lokasi Penelitian**

Penulis melakukan dan menyusun penelitian ini di beberapa tempat, yaitu:

1. Perpustakaan FISIP Universitas Parahyangan

Jln. Ciumbuleuit No. 94 Bandung

1. b. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (BAPUSIPDA).

Jl. Kawaluyaan Indah II No.4 Bandung

* + 1. **Lama Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu tiga bulan, terhitung dari bulan Januari 2017 sampai dengan April 2017. Adapun jadwal kegiatan dari penelitian ini yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel. 1.2

Lama Penelitian

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Tahapan** | **Bulan ke-1** | **Bulan ke-2** | **Bulan ke-3** |
| 1 | Persiapan | X |  |  |
| 2 | Pengumpulan Data | X | X |  |
| 3 | Laporan |  | X | X |

* 1. **Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan rincian dan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang masalah penelitian yang membahas tentang informasi awal mengenai subjek-subjek yang akan dibahas. Indetifikasi masalah, merupakan beberapa masalah terkait bahasan. Rumusan masalah, yang berisikan masalah utama dalam penelitian. Lalu terdapat pula tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data. Selain itu, lokasi penelitian, jadwal dan kegiatan penelitian serta sistematika penelitian pun terdapat pada bab satu.

**BAB II: OBYEK VARIABEL BEBAS**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai variabel yang mempengaruhi atau variabel penjelas. Menguraikan tentang tema utama atau masalah yang dijadikan sebagai variabel bebas.

**BAB III: OBYEK VARIABEL TERIKAT**

Bab ini akan menjelaskan berkenaan tentang variabel yang dipengaruhi. Berisikan urutan informasi umum atau mengenai tema masalah yang penulis jadikan sebagai variabel terikat.

**BAB IV: VERIFIKASI DATA**

Sedangkan pada bab empat ini, berisikan uraian data yang menjawab indikator variabel bebas dan variabel terikat. Serta, penulis juga akan memberikan penjelasan dari jawaban hipotesis yang penulis pakai dan juga indikator-indikator penelitian, baik itu adalah indikator dari variabel bebas maupun variabel terikat. Semua hal tersebut akan di deskripsikan dalam data, sub judul, dan materi.

**BAB V: KESIMPULAN**

Pada bab lima yang sekaligus merupakan bab terakhir dalam penelitian ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di teliti, serta pembuktian dari hipotesis yang di pakai oleh penulis.

1. M. Jean Martet, M. Clemenceau and the Versailles Peace Treaty (London: Wiley, 1930), hlm. 44. [↑](#footnote-ref-2)
2. Raymond J. Sontag, Between the Wars (University of California Press, 1960), hlm. 76. [↑](#footnote-ref-3)
3. Roy L. Samendra, Diplomasi (Jakarta: PT. Grafindo Persaja Utama, 1995), hlm. 23. [↑](#footnote-ref-4)
4. Eling Pramuatmaja, Liga Bangsa-Bangsa. [Online] Tersedia di : https://www.academia.edu/7804755/Liga\_Bangsa-Bangsa [Diakses pada 7 Januari 2017]. [↑](#footnote-ref-5)
5. BBC. t.t. The Wall Street Crash and Depression [Online]. Tersedia dalam: http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/history/mwh/usa/walldepressionrev3.shtml [Diakses pada7 Januari 2017]. [↑](#footnote-ref-6)
6. Illinois. t.t. About the Great Depression [Online]. Tersedia dalam: http://www.english.illinois.edu/maps/depression/about.html [Diakses pada 8 Januari 2017]. [↑](#footnote-ref-7)
7. Georges Van Vrekhem, Tuhan Hitler (Jakarta : Media Kita, 2012), hlm. 53. [↑](#footnote-ref-8)
8. The National Archives. t.t. Chamberlain and Hitler [Online]. Tersedia dalam: http://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/chamberlain-and-hitler/ [Diakses pada 8 Januari 2017]. [↑](#footnote-ref-9)
9. Robert F. Beisner dan Kurt W. Hanson, American Foreign Relations Since 1600: A Guide to the Literature (Santa Barbara: ABC-CLIO, 2nd edition, 2000), hlm. 99. [↑](#footnote-ref-10)
10. Herbert Feis, Churchill-Roosevelt-Stalin: The War They Waged and the Peace They Sought. (New Jersey: Princeton University Press, 1957) hlm. 145-147. [↑](#footnote-ref-11)
11. Foot, John. t.t. Benito Mussolini. [Online] Tersedia di : http://www.britannica.com/biography/Benito-Mussolini [Diakses pada 8 Januari 2017]. [↑](#footnote-ref-12)
12. Herbert Feis, Loc.Cit. [↑](#footnote-ref-13)
13. Robert F Beisner dan Kurt W. Hanson, Op.Cit., hlm. 122 [↑](#footnote-ref-14)
14. A. J. P Taylor, How Wars Begin (London: Endeavour Press, 1979), hlm. 124. [↑](#footnote-ref-15)
15. Antony Beevor, 2012 The Second World War (London: Weidenfeld & Nicolson, 2012), hlm. 10. [↑](#footnote-ref-16)
16. Jalaluddin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Dengan Contoh Analistik Statistik (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 6. [↑](#footnote-ref-17)
17. Uchjana Onong Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Prkatek (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 224. [↑](#footnote-ref-18)
18. Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 91-92. [↑](#footnote-ref-19)
19. Theodore A. Coulumbus dan James H. Wolfe, Introduction to International Relations: Power and Justice, (New Delhi: Prentice Hall 1986), hlm. 276. [↑](#footnote-ref-20)
20. Soerjono Soekanto, Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial (Surabaya: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 55. [↑](#footnote-ref-21)
21. Sunarto,SE.,MM, Perilaku Organisasi (Yogyakarta :Amus, 2003), hlm.12. [↑](#footnote-ref-22)
22. Stephen P. Robbins, Organizational Behavior: Concepts, Controversies, Applications (Minnesota: Prentice Hall, 1996), hlm. 9. [↑](#footnote-ref-23)
23. Leopold von Wiese, Sociology. (Cornell University: Sociological Press, 1928), hlm. 17. [↑](#footnote-ref-24)
24. Margaret M Poloma, Sosiologi Kontemporer (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2003), hlm. 111-113. [↑](#footnote-ref-25)
25. Letjen TNI (purn) Sayidiman Suryohadiprojo, Pengantar Ilmu Perang (Jakarta: Pustaka Intermasa, 2008), hlm. 2 [↑](#footnote-ref-26)
26. Carl Von Clausewitz, Tentang Perang (terjemahan R. Soeatyo). (Jakarta:Pembimbing, 1954), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-27)
27. Hans Morgenthau, Politic Among Nations: The Struggle for Power and Peace, sixth edition (University of Virginia: Miller Centre of Public Affairs, 1985), hlm. 65. [↑](#footnote-ref-28)
28. Hedley Bull, The Anarchical Society A Study of Order in World Politics (Basingstoke: Macmillan, 1977), hlm. 76. [↑](#footnote-ref-29)
29. Roy L. Samendra, Op.Cit., hlm. 44. [↑](#footnote-ref-30)
30. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-31)
31. *Ibid*, hlm. 51. [↑](#footnote-ref-32)